



MANUAL INDIKATOR KERJA UTAMA PUSAT PENYULUHAN KP TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan.

Perencanaan kinerja merupakan penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan yang merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Terkait dengan hal tersebut sebagai instrument untuk pengukuran capaian kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, diperlukan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusluh KP - BPPSDM Tahun 2025. Hasil pengukuran kinerja akan menjadi bahan masukan bagi perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, serta perbaikan perencanaan kinerja di tahun mendatang.

Jakarta, 27 Januari 2025



Yayan Hikmayani



1

Indikator Kinerja:

**Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku
Pendukung yang Disuluh
(Kelompok)**

KODE IK SASARAN		IK UTAMA Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			
1	Nama Indikator	:	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh (Kelompok)		
2	Definisi	:	<p>Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang disuluh dan dibentuk pada tahun sebelumnya oleh Penyuluh Kelautan dan Perikanan. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pendampingan akses modal, pendampingan akses perizinan berusaha dan pendampingan manajemen usaha kelompok. Pelaksanaan pendampingan sesuai penugasan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sebagai bagian dari bentuk pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.</p> <p>Setiap kelompok memiliki kode Registrasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala BPPSDMKP/ Surat Kepala Pusat Penyuluhan KP tentang Pedoman Administrasi dan Profil Kelompok Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.</p> <p>CONTOH Kode Registrasi Kelompok : 3.3.32.12.13.0109.0214</p> <p>3 : Kelompok Kelas Madya (Menjelaskan Kelas Kelompok) 3 : Poklahsar (Menjelaskan Jenis Usaha Kelompok) 32 : Provinsi Jawa Barat (Provinsi) 12 : Kabupaten Indramayu (d disesuaikan dengan kodefikasi pada masing-masing wilayah) 13 : Kecamatan Jatibarang (d disesuaikan dengan kodefikasi pada masing-masing wilayah) 0109 : bulan dan tahun terbentuk kelompok 0214 : bulan dan tahun dikukuhkan di kelas madya</p>		
3	Formula Perhitungan	:	Jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang telah disuluh dan disusun profil kelompoknya sesuai pedoman penyusunan profil yang disahkan oleh Koordinator Penyuluh Perikanan dan Kepala UPT Penyuluhan KP.		
4	Satuan	:	Kelompok		
5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
6	Sumber Data	:	UPT Penyuluhan KP		
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan
10	Metode Cascading	:	<input checked="" type="checkbox"/> Direct		<input type="checkbox"/> Non-Direct



2

Indikator Kinerja:

**Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku
Pendukung yang Ditingkatkan
Kelasnya (Kelompok)**

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan																
1	Nama Indikator	:	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya (Kelompok)																
2	Definisi	:	Jumlah kelompok pelaku usaha/ pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang meningkat kelasnya setelah mendapatkan pendampingan penyuluh Kelautan dan Perikanan, dengan kriteria sesuai Permen KP no 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan, dimana pengukuhan dilakukan oleh Kepala desa/lurah, camat, Kepala Dinas yang membidangi urusan perikanan setempat, Kepala BPPSDMKP sesuai dengan kriteria kelas kemampuan kelompok yang dikukuhkan dan mendapatkan piagam pengukuhan/ sertifikat apresiasi peningkatan kelas kemampuan kelompok.																
3	Formula Perhitungan	:	Hitung Jumlah kelompok pelaku usaha/ pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang meningkat kelas kemampuan kelompoknya dan memenuhi kriteria peningkatan kelas (kelas pemula ke lanjut, kelas lanjut ke madya, kelas madya ke utama) dan jumlah pelaku usaha/ pelaku pendukung yang telah dilakukan pendampingan dan penilaian serta dalam proses penetapan, diperiode triwulan sesuai dengan Permen KP no. 28 Tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.																
4	Satuan	:	Kelompok																
5	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi					() Output kendali rendah					(X) Outcome						
6	Sumber Data	:	UPT Penyuluhan KP																
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi					() Rata-Rata					(X) Nilai Posisi Akhir						
8	Polarisasi	:	(X) Maximize					() Minimize					() Stabilize						
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan					(X) Triwulanan					() Semesteran					() Tahunan	
10	Metode Cascading	:	(X) Direct										() Non-Direct						
11	Bukti Dukung	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang meningkat, beserta nama penyuluh perikanan 2. Data yang disajikan legal (dokumen/matrik) ditandatangani Kepala Satker 3. Dokumen penyampaian data dari Eselon II kepada Kepala BPPSDM KP 																

No.	UPT Penyuluhan KP	Provinsi	Kab/Kota	Nama Kelompok	Nama Ketua Kelompok	NIK Ketua Kelompok	Alamat (Minimal Kecamatan dan Desa)	Bidang Usaha: (Budidaya ; Penangkapan; Pengolahan/ Pemasaran; Garam, Wisata Bahari, Pengawasan, dan Konservasi)	No Piagam Pengukuhan Kelompok (oleh instansi yg mengukuhkan)	Nomor Registrasi Kelompok yg ditingkatkan	Tanggal Pengukuhan Pembentukan Kelompok (Ketika Pertama kali dibentuk/ Kenaikan kelas Sebelumnya)	Skor Kelas Kelompok				Piagam Kenaikan Kelas Kelompok				Nama Penyuluh Pendamping	Status Penyuluh	No. Tlp. Penyuluh
												Semula		Menjadi		Nomor Piagam Kenaikan Kelas	Tanggal Piagam	Jabatan Pejabat yang Mengesahkan	Link Piagam/ sertifikat apresiasi			
												Nilai (Skor)	Kelas Kelompok (pemula, lanjut, madya)	Nilai (Skor)	Kelas Kelompok (lanjut, madya, utama)							
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).	(10).	(11).	(12).	(13).	(14).	(15).	(16).	(17).	(18).	(19).	(20).	(21).	(22).	(23).
1.									Nomor pengukan Pemula		tanggal Pemula		Pemula		Madya	Nomor Madya	Tanggal madya					



3

Indikator Kinerja:

**Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku
Pendukung yang Dibentuk
(Kelompok)**



4

Indikator Kinerja:

**Nilai PNBP Satker Lingkup
Pusat Penyuluhan Kelautan dan
Perikanan (Rupiah Milyar)**

KODE IK SASARAN		IK UTAMA Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan				
1	Nama Indikator	:	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Rupiah Milyar)			
2	Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. • Objek/Ruang Lingkup PNBPN : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. • Dasar hukum : <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN b. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan c. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 			
3	Formula Perhitungan	:	Nilai PNBPN Sektor Kelautan dan Perikanan = Nilai PNBPN SDA + Nilai PNBPN Lainnya			
4	Satuan	:	Rupiah Milyar			
5	Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
6	Sumber Data	:	Pusat Penyuluhan KP, BBRBLPP, BRPPUPP, BRPBAPPP, BRPBATPP			
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
10	Metode Cascading	:	<input checked="" type="checkbox"/> Direct		<input type="checkbox"/> Non-Direct	
11	Bukti Dukung	:	Data Realisasi Pendapatan dari aplikasi OM SPAN per tanggal 10 bulan berikutnya dan/atau surat penyampaian realisasi PNBPN dari Sekretariat BPPSDM KP			



5

Indikator Kinerja:

**Gabungan Kelompok/ Koperasi/
Korporasi yang Mendapatkan
Pendampingan (Unit)**



6

Indikator Kinerja:

**Inovasi Teknologi yang Diterapkan
untuk Penyuluhan Masyarakat
Kelautan dan Perikanan (Paket)**

KODE IK SASARAN		IK UTAMA Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan			
1	Nama Indikator	:	Inovasi Teknologi yang Diterapkan untuk Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Paket)		
2	Definisi	:	<ol style="list-style-type: none"> inovasi teknologi yang diterapkan untuk penyuluhan masyarakat kelautan dan perikanan merujuk pada penggunaan teknologi tepat guna dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan kepada masyarakat yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan. Inovasi teknologi yang diterapkan merupakan teknologi yang telah mendapatkan rekomendasi dan/atau reviu dan tercatat sebagai materi penyuluhan yang ditetapkan oleh Kepala BPPSDMKP Inovasi teknologi ini bersumber dari BPPSDMKP atau unit kerja KKP 		
3	Formula Perhitungan	:	Hitung jumlah inovasi teknologi yang diterapkan untuk penyuluhan yang ditetapkan dalam materi penyuluhan		
4	Satuan	:	Paket		
5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
6	Sumber Data	:	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan		
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
10	Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Direct		<input checked="" type="checkbox"/> Non-Direct
11	Bukti Dukung	:	Keputusan Kepala BPPSDM KP terkait Rekomendasi Teknologi sebagai Materi Penyuluhan		



7

Indikator Kinerja:

**Materi/ Metode Penyuluhan
Terstandar yang Ditetapkan
(Paket)**

KODE IK SASARAN		IK UTAMA Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial ekonomi Kelautan dan Perikanan				
1	Nama Indikator	:	Materi/Metode Penyuluhan Terstandar yang Ditetapkan (Paket)			
2	Definisi	:	Merupakan indikator yang menggambarkan jumlah Materi/ Metode Penyuluhan yang disusun oleh Pusat Penyuluhan KP dan UPT Penyuluhan KP , Penyuluh kelautan dan perikanan yang bersifat informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan			
3	Formula Perhitungan	:	Hitung jumlah Materi dan/atau Metode Penyuluhan yang Ditetapkan			
4	Satuan	:	Paket			
5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
6	Sumber Data	:	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
10	Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Direct		<input checked="" type="checkbox"/> Non-Direct	
11	Bukti Dukung	:	Paket materi penyuluhan (dalam bentuk <i>softfile</i>)			



8

Indikator Kinerja:

**Percontohan Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan yang
Diterapkan (Kelompok)**

KODE IK SASARAN		IK UTAMA Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial ekonomi Kelautan dan Perikanan			
1	Nama Indikator	:	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Kelompok)		
2	Definisi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan teknologi tepat guna dari teknologi terekomendasi 2. Teknologi terekomendasi yang dilaksanakan disesuaikan dengan kondisi teknis, lingkungan, social, ekonomi dan budaya masyarakat di lokasi penyuluhan 3. Hasil dari Percontohan penyuluhan berupa inovasi teknologi tepat guna. 4. Percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan ini bertujuan untuk memperoleh inovasi teknologi yang sesuai dengan karakteristik teknis, lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di lokasi penyuluhan dan berdampak pada peningkatan pendapatan dan keberlanjutan sumber daya KP. 		
3	Formula Perhitungan	:	Hitung jumlah kelompok yang mendapatkan percontohan penyuluhan KP dalam kegiatan <i>Smart Fisheries Village</i> upt dan/atau desa		
4	Satuan	:	Kelompok		
5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
6	Sumber Data	:	BRPBAPPP		
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
10	Metode Cascading	:	<input checked="" type="checkbox"/> Direct		<input type="checkbox"/> Non-Direct
11	Bukti Dukung	:	Laporan pelaksanaan percontohan penyuluhan pada kelompok pelaku usaha		



9

Indikator Kinerja:

Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village) yang Menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Desa)

KODE IK SASARAN		IK UTAMA Terselenggaranya Kegiatan Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village) di Lingkup Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			
1	Nama Indikator	:	Desa Perikanan Cerdas (SFV) yang Menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Desa)		
2	Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> SFV merupakan konsep pengembangan desa perikanan yang berbasis penerapan teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa yang diwujudkan dalam kegiatan prioritas BPPSDM yaitu Desa Perikanan cerdas/ Smart Fisheries Village (SFV) Sesuai dengan Keputusan Ka BPPSDM, dengan dikembangkannya Desa Perikanan cerdas/ Smart Fisheries Village SFV akan terbentuk desa perikanan unggulan yang produktif yang mampu menerapkan teknologi dan informasi, mandiri dan memperhatikan prinsip berkelanjutan 		
3	Formula Perhitungan	:	<p>Indikator capaian Input :</p> <ul style="list-style-type: none"> Penilaian calon lokasi sesuai dengan kriteria Desa Perikanan cerdas/ Smart Fisheries Village SMART SFV oleh TAP dan Unit Kerja Pusat Jumlah desa dikembangkan sesuai dengan kriteria Desa Perikanan cerdas/ Smart Fisheries Village SMART SFV yang dikeluarkan melalui SK Ka BPPSDM <p>Indikator capaian Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan Tridarma Perguruan Tinggi pada lokasi Desa Perikanan cerdas/ Smart Fisheries Village SMART SFV oleh unit kerja pusat 		
4	Satuan	:	Desa		
5	Tingkat Validitas IK	:	(X) Output kendali tinggi	() Output kendali rendah	() Outcome
6	Sumber Data	:	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan		
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir

KODE IK SASARAN		IK UTAMA Terselenggaranya Kegiatan Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village) di Lingkup Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
10	Metode Cascading	:	<input checked="" type="checkbox"/> Direct		<input type="checkbox"/> Non-Direct
11	Bukti Dukung	:	<p>Indikator Capaian Input :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Ka BPPSDM terkait penetapan lokasi Desa Perikanan cerdas/ Smart Fisheries Village • Laporan hasil penetapan lokasi sesuai dengan kriteria Desa Perikanan cerdas/ Smart Fisheries Village Desa <p>Indikator Capaian Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pelatihan dan/atau penyuluhan dan/atau tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan Desa Perikanan cerdas/ Smart Fisheries Village Desa oleh UPT dan disampaikan kepada Kepala Pusat nya 		



10

Indikator Kinerja:

**Penyuluh Perikanan
yang Kompeten (Orang)**

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan										
1	Nama Indikator	:	Penyuluh Perikanan yang Kompeten (Orang)										
2	Definisi	:	Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan PNS yang mengikuti lulus penilaian kompetensi sesuai dengan persyaratan yang berlaku, lulus dan mendapatkan sertifikat kompetensi/ Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Biro SDMAO KKP.										
3	Formula Perhitungan	:	Hitung jumlah penyuluh kelautan dan perikanan PNS yang lulus penilaian kompetensi yang dilakukan oleh <i>Assesment Center</i> KKP										
4	Satuan	:	Orang										
5	Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi			<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali rendah				<input type="checkbox"/> Outcome			
6	Sumber Data	:	UPT Penyuluhan KP										
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi			<input type="checkbox"/> Rata-Rata				<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir			
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize			<input type="checkbox"/> Minimize				<input type="checkbox"/> Stabilize			
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan			<input type="checkbox"/> Triwulanan			<input type="checkbox"/> Semesteran			<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan	
10	Metode Cascading	:	<input checked="" type="checkbox"/> Direct							<input type="checkbox"/> Non-Direct			
11	Bukti Dukung	:	1. Data Penyuluh Perikanan PNS yang lulus penilaian Kompetensi <i>by name by address</i> beserta link Sertifikat/ Surat Keterangan dari Biro SDMAO KKP. 2. Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan										

No.	UPT Penyuluhan	Nama	NIP	Alamat	Nomor Tlp.	Provinsi	Kab/Kota	BIDANG SERTIFIKASI: Kenaikan Jenjang S1 : 1. Pertama ke Muda 2. Muda ke Madya 3. Madya ke Utama D3 : 1. Terampil ke Mahir 2. Mahir ke Penyelia	Lokasi PenKom	Tanggal Uji Kompetensi	No. Sertifikat	Tanggal Sertifikat	Link Sertifikat/ Surat Keterangan
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).	(10).	(11).	(13).	(14).	(15).
1													
2													



11

Indikator Kinerja:

**Persentase Penyuluh Kelautan
dan Perikanan yang Lulus
Pelatihan Teknis (%)**



12

Indikator Kinerja:

**Norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria yang Disusun (NSPK)**

KODE IK SASARAN		IK UTAMA Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan					
1	Nama Indikator	:	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang Disusun (NSPK)				
2	Definisi	:	Merupakan jumlah NSPK yang disiapkan terkait penyelenggaraan Penyuluhan pada Tahun 2025. NSPK disusun dengan melibatkan Stakeholder dan Bagian Hukum Sekretariat BPPSDM dan atau Biro Hukum sesuai dengan tingkat kewenangan NSPK yang dibuat				
3	Formula Perhitungan	:	Hitung jumlah NSPK yang disiapkan terkait penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan				
4	Satuan	:	NSPK				
5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome		
6	Sumber Data	:	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan				
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata		<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize		<input type="checkbox"/> Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran		<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
10	Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Direct			<input checked="" type="checkbox"/> Non-Direct	
11	Bukti Dukung	:	²⁸ 1. NSPK yang telah disahkan oleh Kepala BPPSDM KP, dan/atau Surat usulan NSPK ke Sekretariat BPPSDM KP untuk diproses lanjut ke Biro Hukum KKP; 2. Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan				

No.	Judul NSPK	Penanggung Jawab	Yang Mengesahkan	Nomor Pengesahan	Tanggal Pengesahan	Link Bitly	Keterangan
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).
1							
2							



13

Indikator Kinerja:

Pengelolaan

Basis

Data

Penyuluhan

Kelautan

dan

Perikanan (Unit)

KODE IK SASARAN		IK UTAMA Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			
1	Nama Indikator	:	Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Unit)		
2	Definisi	:	Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan merupakan kegiatan pengelolaan database yang meliputi pengaturan, pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan data yang tersimpan dalam suatu sistem basis data. Pengelolaan ini untuk memastikan data dapat diakses dengan mudah, konsisten dan aman. Metode Pengukuran Pengelolaan Basis data menggunakan Aplikasi Digiluh dan Aplikasi Database yang digunakan untuk keperluan pengelolaan data yang terdiri dari: Kegiatan Program Prioritas Nasional (PPN), Prioritas KKP, SAKIP Mandiri, Capaian Kinerja dalam mendukung Level 1 dan Pusat Penyuluhan KP, serta Pelayanan Publik dan Publikasi Kehumasan Pusat Penyuluhan KP dalam Tahun Anggaran 2025		
3	Formula Perhitungan	:	Jumlah basis data yang dikelola Pusat Penyuluhan KP		
4	Satuan	:	Unit		
5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
6	Sumber Data	:	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan		
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
10	Metode Cascading	:	<input checked="" type="checkbox"/> Direct		<input type="checkbox"/> Non-Direct
11	Bukti Dukung	:	<ol style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan pengelolaan basis data Daftar jenis data yang dikelola 		



14

Indikator Kinerja:

**Sarana Penyuluhan Kelautan
dan Perikanan yang
Ditingkatkan (Unit)**

KODE IK SASARAN		IK UTAMA Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyuluh Kelautan dan Perikanan			
1	Nama Indikator	:	Sarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan (Unit)		
2	Definisi	:	Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Pengadaan fisik dan nonfisik yang diadakan sesuai dengan yang sudah disetujui dan tertuang dalam dokumen perencanaan kerja Satker.		
3	Formula Perhitungan	:	Jumlah Sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja modal		
4	Satuan	:	Unit		
5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
6	Sumber Data	:	BRPPUPP		
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
10	Metode Cascading	:	<input checked="" type="checkbox"/> Direct		<input type="checkbox"/> Non-Direct
11	Bukti Dukung	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan; 2. Laporan kegiatan pelaksanaan 		



15

Indikator Kinerja:

**Prasarana Penyuluhan Kelautan
dan Perikanan yang Ditingkatkan
Kapasitasnya (Unit)**

KODE IK SASARAN		IK UTAMA Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyuluh Kelautan dan Perikanan				
1	Nama Indikator	:	Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)			
2	Definisi	:	Peningkatan kapasitas Prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Pengadaan fisik dan nonfisik yang diadakan sesuai dengan yang sudah disetujui dan tertuang dalam dokumen perencanaan kerja Satker.			
3	Formula Perhitungan	:	Jumlah Prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja modal			
4	Satuan	:	Unit			
5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
6	Sumber Data	:	BRPPUPP			
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
10	Metode Cascading	:	<input checked="" type="checkbox"/> Direct	<input type="checkbox"/> Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	³⁴ 1. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan; 2. Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan.			



16

Indikator Kinerja:

**Kemitraan yang Disepakati dan/atau
Ditindaklanjuti Lingkup Pusat
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
(Dokumen)**

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan			
1	Nama Indikator	:	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)		
2	Definisi	:	Jumlah dokumen kerja sama Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan antar lembaga dan internasional yang ditandatangani/ disepakati sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/PERMEN KP/2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.		
3	Formula Perhitungan	:	Hasil inventarisasi dan perhitungan dokumen Kerjasama lingkup antar Lembaga dan internasional dan disepakati Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Bersama para pihak kerja sama		
4	Satuan	:	Dokumen		
5	Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
6	Sumber Data	:	Pusat Penyuluhan KP, BBRBLPP, BRPPUPP, BRPBAPPP, BRPBATPP		
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Triwulanan <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
10	Metode Cascading	:	<input checked="" type="checkbox"/> Direct		<input type="checkbox"/> Non-Direct
11	Bukti Dukung	:	Dokumen kesepakatan yang telah ditandatangani		



17

Indikator Kinerja:

**Persentase Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk
Perbaikan Kinerja Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan (%)**

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan			
1	Nama Indikator	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)		
2	Definisi	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit kerja lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sampai dengan waktu pengukuran.		
3	Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Pusat Penyuluhan KP}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Pusat Penyuluhan KP}} \times 100\%$		
4	Satuan	:	%		
5	Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
6	Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal		
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan
10	Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Direct		<input checked="" type="checkbox"/> Non-Direct
11	Bukti Dukung	:	Surat penyampaian hasil Rekomendasi Pengawasan dari Sekretariat BPPSDM KP		



18

Indikator Kinerja:

**Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan (Nilai)**

KODE IK SASARAN	IK MANDATORY Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
-----------------	---

1	Nama Indikator	:	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)
---	----------------	---	---

2	Definisi	:	Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran
---	----------	---	---

3	Formula Perhitungan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. • Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. <p>Nilai IKPA = $\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobor Indikator } n) : \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 70%;">Uraian Indikator IKPA</th> <th style="width: 25%;">Bobot (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Revisi DIPA</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Deviasi RPD</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Penyerapan Anggaran</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Belanja Kontraktual</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Penyelesaian Tagihan</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Pengelolaan UP dan TUP</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>Dispensasi SPM</td> <td style="text-align: center;">(Pengurang Nilai IKPA)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>Capaian Output</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)	1	Revisi DIPA	10	2	Deviasi RPD	15	3	Penyerapan Anggaran	20	4	Belanja Kontraktual	10	5	Penyelesaian Tagihan	10	6	Pengelolaan UP dan TUP	10	7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)	8	Capaian Output	25
No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)																												
1	Revisi DIPA	10																												
2	Deviasi RPD	15																												
3	Penyerapan Anggaran	20																												
4	Belanja Kontraktual	10																												
5	Penyelesaian Tagihan	10																												
6	Pengelolaan UP dan TUP	10																												
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)																												
8	Capaian Output	25																												

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan			
4	Satuan	:	Nilai		
5	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi	(X) Output kendali rendah	() Outcome
6	Sumber Data	:	Pusat Penyuluhan KP		
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	(X) Semesteran () Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct	
11	Bukti Dukung	:	Aplikasi OM SPAN dan/atau Surat/Nota Dinas Biro Keuangan		



19

Indikator Kinerja:

**Penilaian Mandiri SAKIP Pusat
Penyuluhan Kelautan dan
Perikanan (Nilai)**

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan																											
1	Nama Indikator	:	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)																										
2	Definisi	:	Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.																										
3	Formula Perhitungan	:	<p>Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>>90 - 100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>>80 - 90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>>70 - 80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>>60 - 70</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>>50-60</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>>30 - 50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0 - 30</td> <td><u>Sangat Kurang</u></td> </tr> </tbody> </table>			Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan	A	>80 - 90	Memuaskan	BB	>70 - 80	Sangat Baik	B	>60 - 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 - 50	Kurang	D	0 - 30	<u>Sangat Kurang</u>
Kategori	Nilai	Predikat																											
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan																											
A	>80 - 90	Memuaskan																											
BB	>70 - 80	Sangat Baik																											
B	>60 - 70	Baik																											
CC	>50-60	Cukup																											
C	>30 - 50	Kurang																											
D	0 - 30	<u>Sangat Kurang</u>																											
4	Satuan	:	Nilai																										
5	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi	43	(X) Output kendali rendah () Outcome																								
6	Sumber Data	:	Sekretariat BPPSDM KP																										
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir																								
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize																								
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan																								
10	Metode Cascading	:	(X) Direct		() Non-Direct																								
11	Bukti Dukung	:	Surat Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Pusluh KP dari Sekretariat BPPSDM KP																										



20

Indikator Kinerja:

**Nilai Kinerja Perencanaan
Anggaran Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan (Nilai)**

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan													
1	Nama Indikator	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)												
2	Definisi	:	Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.												
3	Formula Perhitungan	:	<p>Formula Perhitungan NKA Satker adalah sebagai berikut:</p> $NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ <p>Keterangan: NKA Satker : Nilai Kinerja Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Variabel</th> <th>Uraian</th> <th>Bobot (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Efektivitas (75%)</td> <td>1. Capaian Indikator Kinerja Program</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>2. Nilai Efektifitas Satker</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Efisiensi (25%)</td> <td>1. Nilai Efisiensi Satker</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>		Variabel	Uraian	Bobot (%)	Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30	2. Nilai Efektifitas Satker	45	Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	25
Variabel	Uraian	Bobot (%)													
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30													
	2. Nilai Efektifitas Satker	45													
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	25													
4	Satuan	:	Nilai												
5	Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali rendah											
6	Sumber Data	:	Pusat Penyuluhan KP												
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata											
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize											
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan											
10	Metode Cascading	:	<input checked="" type="checkbox"/> Direct	<input type="checkbox"/> Non-Direct											
11	Bukti Dukung	:	Nota Dinas Sekretariat Jenderal												



21

Indikator Kinerja:

**Indeks Profesionalitas ASN
Pusat Penyuluhan Kelautan dan
Perikanan (Indeks)**

1 Nama Indikator :

Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Indeks)

2 Definisi :

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

3 Formula Perhitungan :

- Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a)Kualifikasi, (b) Kompetensi; (c) Kinerja; dan (d) Disiplin.
- Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Keterangan:
 IP = Indeks Profesionalisme
 IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i
 IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
 IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
 IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
 IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan			
4	Satuan	:	Indeks			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi	(X) Output kendali rendah	() Outcome	
6	Sumber Data	:	BIRO SDMAO			
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	(X) Semesteran	() Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct		() Non-Direct	
11	Bukti Dukung	:	Surat Penyampaian Hasil Nilai IP ASN dari Sekretariat BPPSDM KP			



22

Indikator Kinerja:

**Persentase Rencana Umum
Pengadaan PBJ yang Diumumkan
pada SIRUP Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan (%)**

KODE IK SASARAN		IK UTAMA Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan			
1	Nama Indikator	:	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)		
2	Definisi	:	Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.		
3	Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ <p>Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini</p>		
4	Satuan	:	%		
5	Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
6	Sumber Data	:	Biro Umum dan PBJ		
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan
10	Metode Cascading	:	<input checked="" type="checkbox"/> Direct		<input type="checkbox"/> Non-Direct
11	Bukti Dukung	:	Surat dari Sekretariat BPPSDM KP		



23

Indikator Kinerja:

**Tingkat Kepatuhan Pengelolaan
BMN Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan (%)**

KODE IK SASARAN		IK UTAMA Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan				
1	Nama Indikator	:	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)			
2	Definisi	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
3	Formula Perhitungan	:	<p>Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :</p> <p>Formula</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%). 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%) 			
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
6	Sumber Data	:	Sekretaris BPPSDM KP			
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
10	Metode Cascading	:	<input checked="" type="checkbox"/> Direct		<input type="checkbox"/> Non-Direct	
11	Bukti Dukung	:	Surat Sekretaris BPPSDM KP tentang Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDM KP			



Terima Kasih.